

**BATAS MORAL KEPATUHAN:  
SEBUAH KAJIAN ETIKA MILITER BERDASARKAN PEMIKIRAN  
CLAUSEWITZ DALAM BUKU *VOM KRIEG***

**DISERTASI**

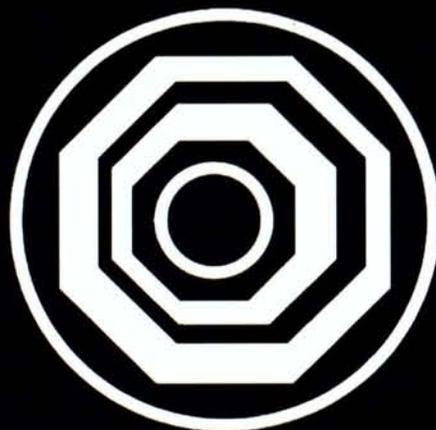
Karya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dari STF Driyarkara

Oleh

**Adwin Wibisono**

**0510108516**

**Program Doktor**



**SEKOLAH TINGGI FILSAFAT DRIYARKARA**

**2023**

**BATAS MORAL KEPATUHAN:  
SEBUAH KAJIAN ETIKA MILITER BERDASARKAN PEMIKIRAN  
CLAUSEWITZ DALAM BUKU *VOM KRIEG***

**DISERTASI**

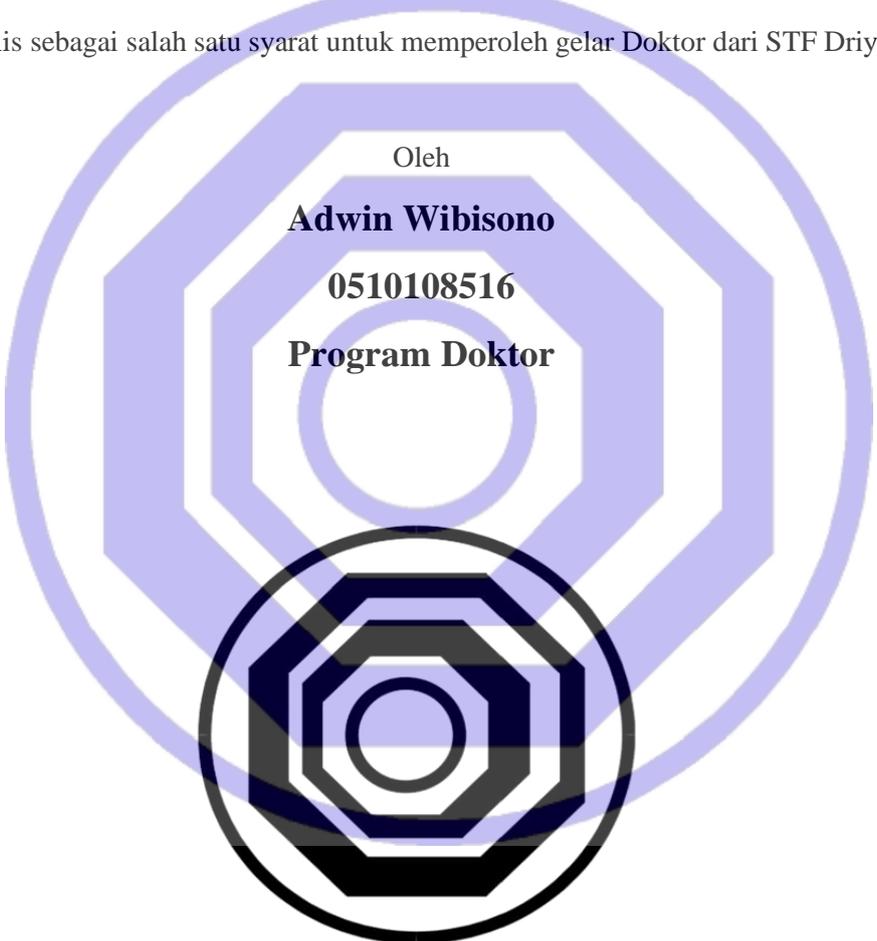
Karya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dari STF Driyarkara

Oleh

**Adwin Wibisono**

**0510108516**

**Program Doktor**



**SEKOLAH TINGGI FILSAFAT DRIYARKARA**

**2023**

## ABRSTRAK

[A] ADWIN WIBISONO (0510108516)

[B] BATAS MORAL KEPATUHAN: SEBUAH KAJIAN ETIKA MILITER BERDASARKAN PEMIKIRAN CLAUSEWITZ DALAM BUKU *VOM KRIEG*

[C] VIII + 107 hlm; Daftar Pustaka

[D] Kata Kunci: Clausewitz, etika, kepatuhan, militer

Kepatuhan yang menjadi ciri khas angkatan bersenjata menjadi masalah tatkala dijadikan alasan pada pelaku kejahatan perang dengan mengatakan bahwa ia “sekedar menjalankan perintah” atau menjadi dilematis jika seorang prajurit diperintah melakukan tindakan yang jelas-jelas melanggar hukum. Tulisan ini membahas batasan moral kepatuhan dari sudut pandang etika militer itu sendiri.

Penelitian ini adalah studi pustaka dengan mengacu pada tulisan Clausewitz dalam *On War (Vom Krieg)* terutama pada pandangannya aspek kemanusiaan dalam perang dan pandangan-pandangan mengenai etika militer. Masalah yang diangkat adalah apakah tindakan menolak perintah dapat dinilai sebagai tindakan etis. Masalah ini akan dibahas dari sudut etika militer dengan pertama-tama melihat sejarah perkembangan militer profesional dan etika yang mendasarinya. Clausewitz tidak membahas kepatuhan itu sendiri melainkan menekankan subordinasi angkatan bersenjata pada pemerintah yang sah. Tujuan angkatan bersenjata bertempur adalah sarana mencapai tujuan politis pemerintah. Etika militer terkesan bersifat teleologis tetapi sesungguhnya pragmatis; sifat deontologis hanya terbatas pada tahapan taktis dan tidak pada tahapan yang strategis.

Clausewitz menganggap keberanian tidak hanya pada konteks ketidaktakutan dalam pertempuran melainkan juga keberanian untuk bertanggung jawab. Maka kepatuhan pada perintah bisa disimpulkan sebagai persetujuan pada pemberi perintah tersebut dan pelaksana perintah menerima pertanggungjawaban atas hasil tindakannya. Di pihak lain penolakan perintah bisa dikatakan sebagai tindakan etis jika perintah tersebut salah, penerima perintah mengetahui bahwa perintah yang salah tadi berlawanan dengan tujuan militer yang lebih tinggi serta mempunyai kemampuan untuk menolak.

Karya tulis ini adalah pembaharuan pada perujukan Clausewitz pada masalah etika militer di luar perujukannya sekedar pada strategi perang. Kesimpulan ini juga menunjukkan pentingnya pemahaman pada etika di tubuh angkatan bersenjata terutama di zaman sekarang ini yang makin lama makin memaksakan pengambilan keputusan strategis pada pangkat yang lebih rendah.

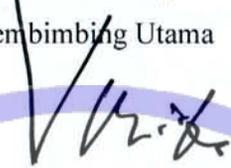
[E] Pustaka 76 (1978-2022)

[F] Prof. Dr. J. Sudarminta; Dr. A. Setyo Wibowo; Dr. Simon P. Lili Tjahjadi

**BATAS MORAL KEPATUHAN:  
SEBUAH KAJIAN ETIKA MILITER BERDASARKAN PEMIKIRAN  
CLAUSEWITZ DALAM BUKU *VOM KRIEG***

yang disusun oleh Adwin Wibisono  
NIM : 0510108516  
Telah diuji pada tanggal 15 April 2023

Pembimbing  
Pembimbing Utama

  
Prof. Dr. J. Sudarminta

Pembimbing Pendamping I

  
Dr. A. Setyo Wibowo

Penguji I

  
Dr. Mikhael Dua

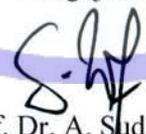
Pembimbing Pendamping II

  
Dr. Simon P. Lili Tjahjadi

Penguji II

  
Dr. H. Dwi Kristanto

Penguji III

  
Prof. Dr. A. Sudiarja

Disertasi ini disahkan pada tanggal 13 Mei 2023

Direktur  
Program Pascasarjana

  
Dr. Karlina Supelli

Ketua  
Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

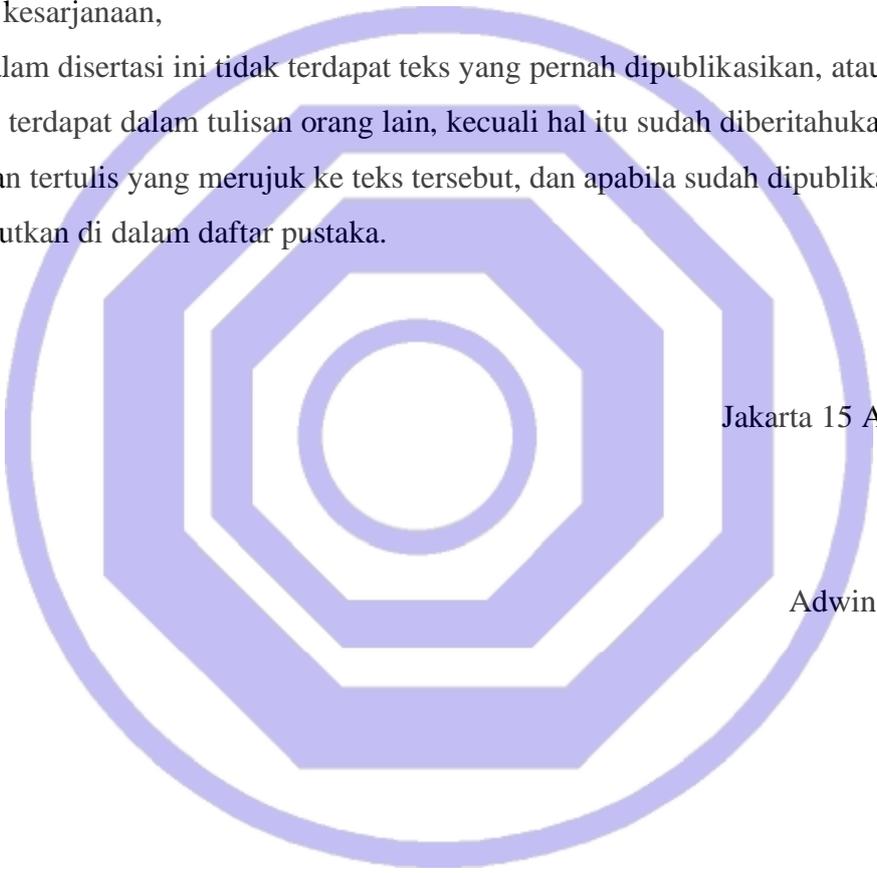
  
Thomas Hidyatjaya, Ph.D.



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Disertasi belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di lembaga pendidikan tinggi lain,
2. Di dalam disertasi ini tidak terdapat teks yang pernah diajukan seagai karya tertulis, atau sebagai bagian karya tulis di salah satu Perguruan Tinggi untuk memperoleh gelar kesarjanaan,
3. Di dalam disertasi ini tidak terdapat teks yang pernah dipublikasikan, atau
4. Yang terdapat dalam tulisan orang lain, kecuali hal itu sudah diberitahukan dalam catatan tertulis yang merujuk ke teks tersebut, dan apabila sudah dipublikasikan disebutkan di dalam daftar pustaka.



Jakarta 15 April, 2023

Adwin Wibisono

## PEDOMAN PENGGUNAAN DISERTASI

Disertasi Doktor yang tidak dipublikasikan terdaftar dan tersedia di Perpustakaan Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, dan terbuka untuk umum dengan ketentuan bahwa hak cipta ada pada pengarang dengan mengikuti aturan HaKI yang berlaku di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara. Referensi kepustakaan diperkenankan dicatat, tetapi pengutipan atau peringkasan disertasi hanya dapat dilakukan dengan seizin pengarang dan harus disertai dengan kebiasaan ilmiah untuk menyebutkan sumbernya.

Memperbanyak atau menerbitkan sebagian atau seluruh disertasi haruslah seizin Direktur Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara.



## UCAPAN TERIMA KASIH

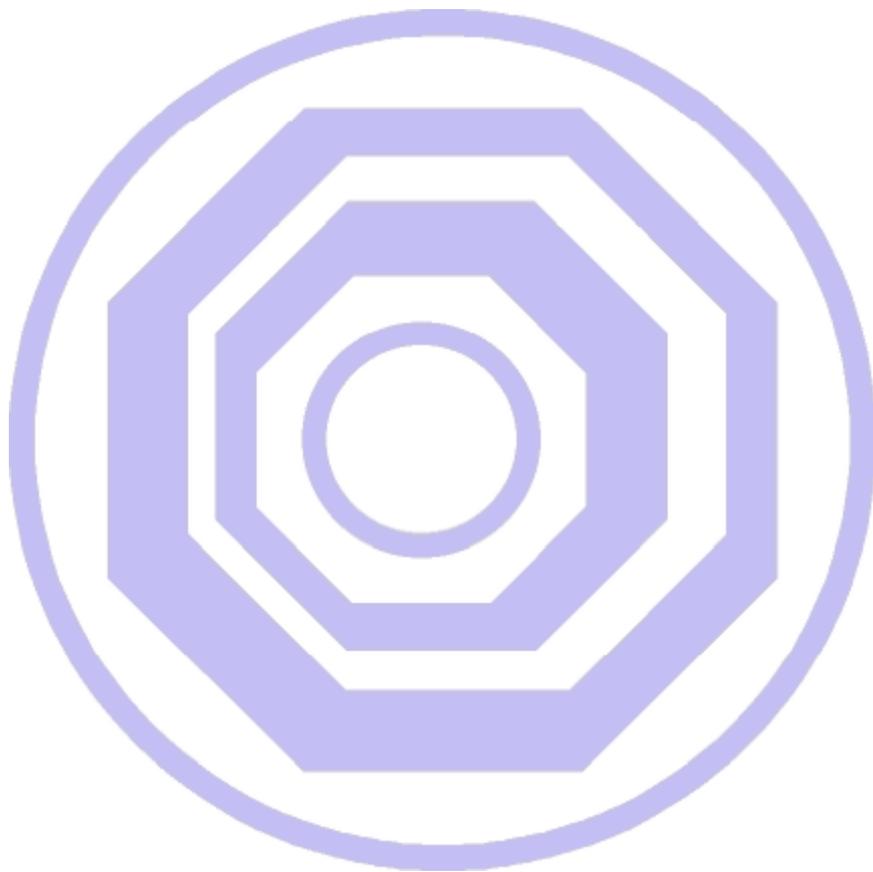
Saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. J. Sudarminta, sosok ayah yang sejak awal dengan sabar telah membimbing, membantu, dan menyemangati saya jauh melampaui tugas seorang Promotor. Kepada kedua Ko-promotor, saya ucapkan terima kasih pada Dr. A. Setyo Wibowo yang telah memberi masukan yang sangat berarti pada penulisan ini, dan Dr. Simon P. Lili Tjahjadi yang terus-menerus menantang saya untuk mencari tahu lebih banyak dalam penulisan disertasi ini. Saya juga berterima kasih pada kedua penguji, Dr. Mikhael Dua dan Dr. H. Dwi Kristanto, yang tidak saja menemukan kelemahan dalam rancangan tulisan ini tetapi juga – lebih penting - memberikan masukan untuk memperbaikinya.

Terima kasih pada Dr. Karlina Supelli selaku Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi Doktor STF Driyarkara yang telah memperkenalkan penulis menempuh ujian-ujian sebelumnya dan sedianya memimpin sidang promosi, dan juga Prof. Dr. A. Sudiarja yang dalam waktu yang singkat berkenan menggantikan beliau memimpin sidang. Terima kasih banyak seluruh pada pengajar, staf, dan mahasiswa di STF. Para dosen STF tidak sekedar membagi ilmu, tetapi juga mendorong para mahasiswa untuk bisa lebih. Staf administrasi STF, Mbak Asih dan Mbak Retno, selalu dengan senang hati membantu dalam masalah administrasi. Terima kasih terutama pada rekan-rekan seangkatan yang secara rutin bertemu untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi dalam penulisan disertasi – pertemuan seperti ini memberi kesempatan untuk saling membantu dan menyemangati.

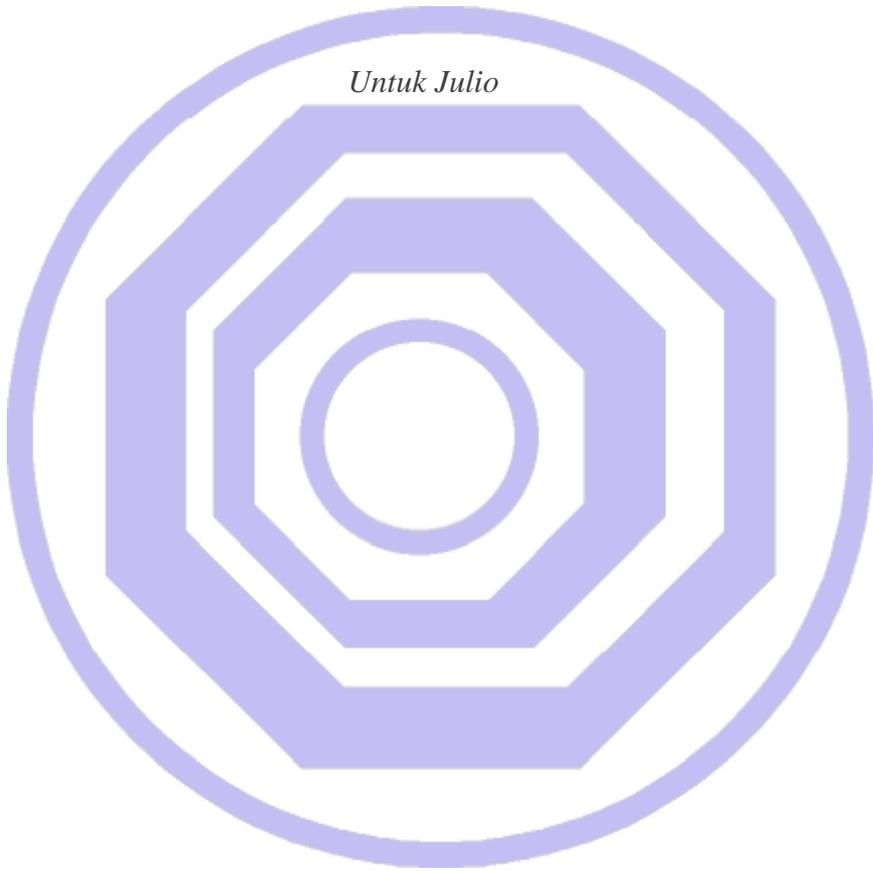
Saya juga berterima kasih kepada teman dan kerabat yang telah membantu saya, terutama para rekan kerja di Roy Morgan Indonesia dan FISIP UI yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian studi saya. Tidak pernah ada kesulitan meminta izin jika alasannya adalah dalam rangka menyelesaikan disertasi.

Terakhir adalah ucapan terima kasih pada keluarga tercinta Pulomas. Kepada saudara-saudara saya, Mbak Mur, Poppy dan Jakobus, dan para keponakan, Ipung, Nancy dan Albert; saya tidak mungkin menyelesaikan studi ini tanpa cinta kasih, bantuan dan dukungan moral yang diberikan selama ini. Ayahanda Prof. Dr. Didi Bachtiar Lubis (almarhum) adalah inspirasi saya untuk melanjutkan pendidikan dan belajar filsafat, Ibunda Wimurti Soemarto

adalah sosok pemberdaya keluarga untuk mencapai cita-cita. Saya berterima kasih pada istri tercinta, Maira Catacutan, yang setia menemani saya dalam keadaan suka maupun duka dalam studi maupun kehidupan. Tak lupa ucapan terima kasih pada anak tersayang, Adwin Julio Wibisono, yang menjadi alasan saya terus berjuang dan belajar dan saya dedikasikan disertasi ini.



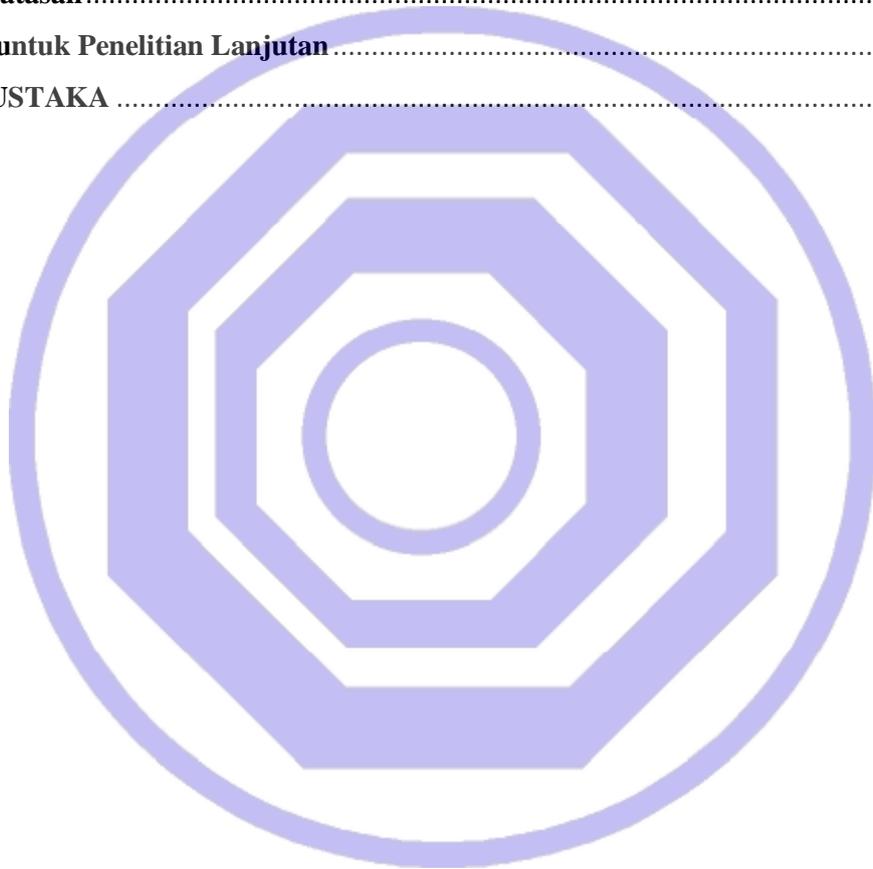
*Untuk Julio*



## DAFTAR ISI

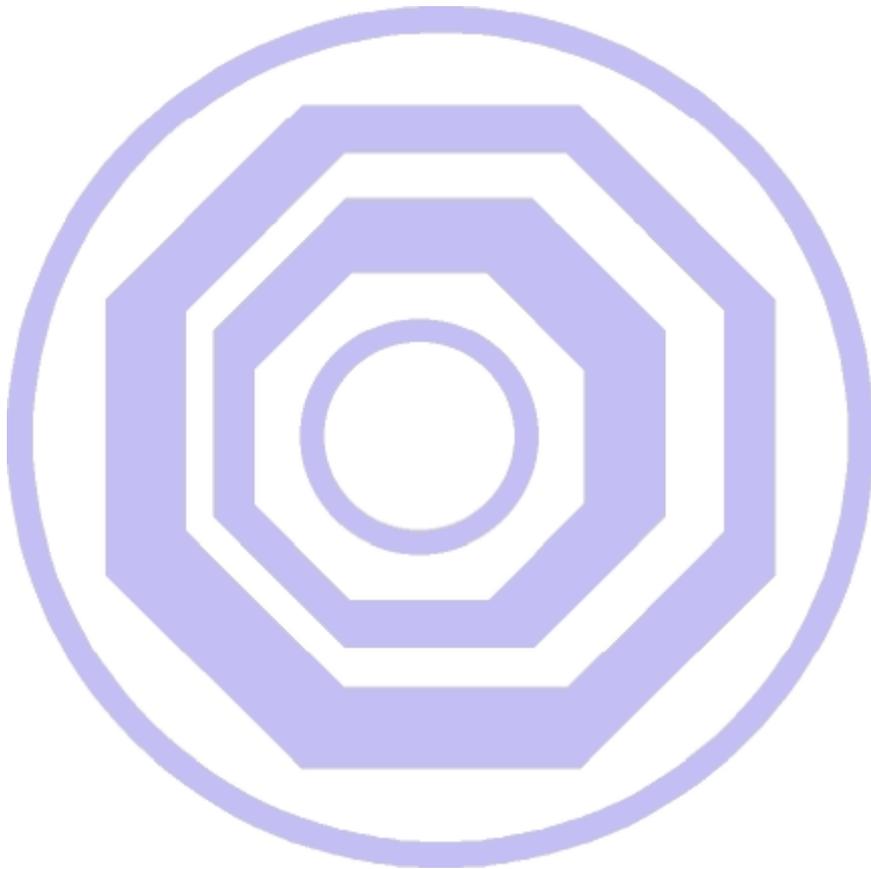
ABRSTRAK .....	ii
PERNYATAAN.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ixx
DAFTAR TABEL.....	xii
<b>Bab I Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>11</b>
<b>1.3 Tesis.....</b>	<b>12</b>
<b>1.4 Relevansi dan Kebaruan.....</b>	<b>13</b>
<b>1.5 Metode Penelitian Disertasi.....</b>	<b>14</b>
<b>1.6 Tujuan.....</b>	<b>15</b>
<b>1.7 Sistematika Penulisan Disertasi.....</b>	<b>15</b>
<b>Bab II Latar Belakang Pemikiran Clausewitz dan Etika Profesi Militer.....</b>	<b>18</b>
<b>2.1 Latar Belakang Clausewitz.....</b>	<b>18</b>
<b>2.2 Sekilas <i>Vom Krieg</i> dan Pemikiran Clausewitz .....</b>	<b>21</b>
<b>2.3 Filsafat yang Berpengaruh Pada Pemikiran Clausewitz .....</b>	<b>30</b>
<b>2.4 Sejarah Profesi Militer .....</b>	<b>37</b>
<b>2.5 Rangkuman.....</b>	<b>45</b>
<b>Bab III Kepatuhan dan Etika Militer Clausewitz.....</b>	<b>47</b>
<b>3.1 Etika Militer Clausewitz: Keberanian dan Akal .....</b>	<b>47</b>
<b>3.2 Keabsahan Perintah.....</b>	<b>52</b>
<b>3.3 Kepatuhan pada Perintah.....</b>	<b>57</b>
<b>3.4 <i>Auftragstaktik</i> .....</b>	<b>63</b>
<b>3.5 Rangkuman.....</b>	<b>68</b>
<b>Bab IV Batas Moral Kepatuhan .....</b>	<b>70</b>
<b>4.1 Kepatuhan dan Tindakan Moral.....</b>	<b>71</b>
<b>4.2 Pemahaman Tujuan, Dilema Etis dan Kemampuan Bertindak.....</b>	<b>74</b>
<b>4.3 Kabut Perang (<i>Fog of War</i>) dan Pelaksanaan Tindakan.....</b>	<b>79</b>
<b>4.4 Tanggung Jawab Moral Kepatuhan (atau Ketidakpatuhan) .....</b>	<b>84</b>
<b>4.5 Rangkuman.....</b>	<b>88</b>

<b>Bab V Tanggapan Kritis .....</b>	<b>90</b>
<b>5.1 Perang Bukan Sekedar Kepanjangan Politik .....</b>	<b>90</b>
<b>5.2 Etika Militer Hanya Berlaku Pada Tentara Reguler Profesional .....</b>	<b>92</b>
<b>5.3 Sifat Deontologis Etika Militer .....</b>	<b>94</b>
<b>5.4 Otoritas Tertinggi yang Memberikan Perintah yang Tidak Salah .....</b>	<b>97</b>
<b>5.5 Rangkuman.....</b>	<b>100</b>
<b>Bab VI Penutup: Kesimpulan dan Penelitian Lebih Lanjut.....</b>	<b>102</b>
<b>6.1 Kesimpulan .....</b>	<b>102</b>
<b>6.2 Kebaruan.....</b>	<b>104</b>
<b>6.3 Keterbatasan.....</b>	<b>105</b>
<b>6.4 Saran untuk Penelitian Lanjutan.....</b>	<b>107</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel Tabel Nilai-nilai yang Dipegang Sejumlah Angkatan Bersenjata.....	43
---	----



## Bab I Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kepatuhan adalah salah satu ciri khas organisasi militer. Selain keberanian, banyak sifat senada seperti kesetiaan, disiplin, dan kewajiban<sup>1</sup> tertulis sebagai doktrin pada angkatan bersenjata berbagai negara. Bahkan pada Sumpah Prajurit anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) tercantum bahwa mereka akan “taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.” Tidak bisa dipungkiri bahwa profesi militer – yang bercirikan pengelolaan dan pelaksanaan kekerasan – mesti tunduk pada dan dikendalikan otoritas yang tinggi dan penggunaannya didasari alasan bijak yang tanpanya berwujud kekerasan dan kejahatan semata. Kepatuhan pada perintah atasan adalah bentuk kendali untuk memastikan penggunaan kekerasan sesuai dengan kebijakan negara, namun di sisi lain, sering kali pelaku kejahatan perang membela diri di hadapan persidangan dengan mengatakan bahwa mereka sekedar menjalankan perintah.

Salah satu ciri organisasi militer atau angkatan bersenjata adalah adanya struktur kepemimpinan yang kaku berupa rantai komando yang tegas dari atas ke bawah serta kepatuhan pada perintah atasan. Kita terbiasa melihat perwira memberikan perintah dan segera dilaksanakan oleh anak buah seraya ucapan “Siap!” atau “*Sir, yes Sir!*” tanpa berpikir. Perintah adalah perintah, dan dalam keadaan apa pun juga harus dipatuhi dan dilaksanakan. Kepatuhan pada perintah adalah kewajiban bahkan tindakan etis dari semua anggota organisasi militer. Adanya kemutlakan pada perintah ini dapat ditelusuri dari sejarah berdirinya organisasi militer yang profesional yang membedakannya dari sekedar kumpulan manusia yang berkelahi dengan kumpulan yang lain.

Bertempur menggunakan formasi mengandaikan kontrol yang kuat agar unit tempur mempertahankan formasi, posisi serta bergerak sebagai satu kesatuan di bawah kepemimpinan tunggal. John Keegan dalam *A History of Warfare*<sup>2</sup> menjelaskan setelah manusia berperang sebagai suatu kesatuan – dibanding sekedar bertarung sendiri-sendiri – maka butuh perangkat khusus yang memastikan semua prajurit dalam kesatuan tersebut

---

<sup>1</sup> Robinson, P., Lee, N. d., & Carrick, D. (Penyunt.). (2008). *Ethics Education in the Military*. England: Ashgate Publishing Limited. hal.7.

<sup>2</sup> John Keegan (1994) dalam *A History of Warfare*. New York: Alfred A.Knopf hal. 3-5.

bertindak sebagai satu unit di bawah satu petunjuk pelaksanaan. Para prajurit akan melaksanakan tugasnya yang sama dan secara bersamaan mengikuti perintah dari komandannya. Barisan *phalanx* yang diprakarsai oleh bangsa Yunani kuno merupakan bentuk formasi taktis tempur berbentuk persegi yang terdiri dari beberapa barisan prajurit bersenjata *sarissa* dan *hoplon*<sup>3</sup> dan yang berdiri dan berbaris secara rapat. Walau persenjataan berubah formasi *phalanx* yang dipakai sejak abad ketujuh sebelum Masehi menginspirasi formasi taktis pasukan Romawi yang bersenjatakan *gladius* dan *scutum*<sup>4</sup> hingga abad kelima Masehi, formasi *tercio* yang terdiri dari *pikemen* (prajurit bertombak) dan *musketeer* (prajurit bersenjatakan *matchlock*<sup>5</sup>). Perkembangan teknologi pada senjata api di abad kedelapan belas belum menjamin ketepatan (akurasi) maka prajurit dilatih untuk menembak secara bersamaan pada barisan musuh untuk memastikan efek sebesar-besarnya. George Nafziger dan Paddy Griffith<sup>6</sup> adalah contoh penulis yang membahas masalah taktis dalam sejarah pertempuran Napoleonik, di antaranya formasi tempur, tatacara berbaris dan membentuk formasi serta perintah-perintah yang berhubungan dengan formasi dan menembak.

Performa pasukan di medan perang bergantung pada sifat kohesif prajurit yang bertempur sebagai kesatuan. Untuk mengantisipasi kekacauan dalam pertempuran prajurit dilatih untuk mengikuti perintah komandannya. Kelalaian mengikuti perintah dapat berakibat buruk pada pasukan misalnya penembakan yang tidak bersamaan tidak memberi efek besar pada barisan musuh dan prajurit yang meninggalkan posisinya dalam barisan akan melemahkan barisan dan memungkinkan penetrasi dari musuh yang menyerang. Untuk memastikan adanya kesamaan pengertian dan keseragaman dalam bertindak, prajurit dilatih

---

<sup>3</sup> *Sarissa* (σάρισσα) atau *pike* adalah tombak sepanjang tiga hingga empat meter. *Hoplon* (ὄπλον) adalah perisai bundar dari kayu dan perunggu yang dapat melindungi bagian tubuh dari leher hingga pinggul, dan merupakan asal kata *hoplite* yaitu sebutan prajurit infantri berat Yunani kuno.

<sup>4</sup> *Gladius* adalah pedang pendek yang menjadi senjata standar prajurit infantri berat Romawi (*legionnaire*) dan *scutum* adalah perisai persegi. Persenjataan ini adalah ciri khas dalam penggambaran prajurit Romawi yang sering kita lihat.

<sup>5</sup> *Matchlock* adalah jenis senapan lontak yang peledakan mesiu propelannya dilakukan dengan sumbu. Senjata ini adalah bentuk awal senapan yang nantinya diganti dengan jenis *flintlock* (peledakan dari hasil gesekan batu api pada pelatuk) dan *percussion lock* (hasil hantaman pelatuk pada mesiu).

<sup>6</sup> George Nafziger (1996) dalam *Imperial Bayonets – Tactics of the Napoleonic Battery, Battalion and Brigade as Found in Contemporary Regulations* London: Greenhill Books dan Griffith, Paddy (1990) *Forward Into Battle*. CA: Presidio Press.

dengan disiplin yang ketat serta rantai komando yang baku, prajurit dilatih untuk bertindak mengikuti perintah dibanding berpikir – berpikir adalah tugas panglima dan stafnya.

Pentingnya kepatuhan pada perintah juga dipengaruhi oleh kesenjangan latar belakang antara prajurit biasa dengan golongan perwira yang memimpinya. Sebelum Revolusi Prancis hampir semua negara di benua Eropa berbentuk kerajaan dan golongan perwira hampir semuanya berasal dari kalangan ningrat, sedangkan para prajurit pengisi pasukan terdiri dari lapisan masyarakat paling bawah. Negara mendapatkan prajuritnya dari mereka yang tidak bisa mendapatkan nafkah dari pekerjaan lain, mereka yang menjalani kehidupan militer sebagai bentuk hukuman atau dengan cara pemaksaan seperti wajib militer. Kondisi ini melahirkan pemikiran bahwa prajurit rendah tidak dapat berpikir sendiri dan karenanya harus diatur untuk dapat bekerja dengan cara hanya tunduk pada perintah atasan.

Kiranya hal-hal di atas adalah yang melahirkan tradisi kepatuhan tegas pada perintah dalam organisasi militer. Pekerjaan yang menyangkut bahaya seperti perang harus diatur dan dibatasi agar tidak ada penyelewengan dalam penyelenggaraan tugas militer. Dalam hal ini terkesan bahwa etika militer yang diemban organisasi militer adalah deontologis yaitu etika yang berdasarkan pada kewajiban. Etika deontologis melihat norma moral mengikat secara mutlak dan tidak tergantung pada hasil tindakan yang dilakukan (misalnya apakah menguntungkan atau tidak), melainkan pada ketaatannya itu sendiri<sup>7</sup>. Tindakan melanggar perintah dilihat sebagai hal yang sangat buruk bahkan berbahaya oleh kalangan militer karena dampaknya sangat berpengaruh bukan saja pada masalah hidup dan matinya pelaku perang, melainkan bisa meluas pada penderitaan mereka yang tidak terlibat perang dan tujuan kebijakan negara.

Emmanuel Goffi<sup>8</sup> memperlihatkan tradisi kepatuhan mutlak dalam angkatan bersenjata ini bahkan pernah ingin dibakukan di Prancis di tahun 1980-an dengan argumen bahwa karena angkatan bersenjata adalah alat dan tunduk pada kebijakan negara, maka kepatuhan pada atasan dalam lingkungan militer secara langsung berarti kepatuhan pada kebijakan negara; dengan sendirinya melanggar perintah atasan sama dengan melanggar kebijakan negara. Di Indonesia butir ketiga Sumpah Prajurit mewajibkan prajurit “taat kepada atasan dengan tidak

---

<sup>7</sup> Sudarminta J. (2013) *Etika Umum*. Yogyakarta: Kanisius hal. 136.

<sup>8</sup> Goffi, E. R. (2014). “There is No Real Moral Obligation to Obey Orders: Escaping from ‘Low Cost Deontology’” dalam A. Ellner, P. Robinson, & D. Wetham (Penyunt.), *When Soldiers Say No*. New York: Ashgate Publishing hal. 33-37.

membantah perintah atau putusan”; suatu sumpah yang dengan sendirinya bersifat deontologis.

Kepatuhan pada perintah atasan menjadi ciri kehidupan prajurit dan ditanamkan sejak dari pendidikan calon prajurit dan perwira. Tradisi kepatuhan ini malah bisa dilihat selain pada saat berperang atau bertugas. Kita merasa wajar jika seorang prajurit tetap melaksanakan perintah prajurit lain yang berpangkat lebih tinggi walau tidak dalam konteks dinas.

Masalah yang timbul dari kepatuhan yang mutlak adalah pelepasannya dari tanggung jawab pelaku. Dalam sejarah banyak tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer dengan alasan semata-mata mematuhi perintah atasan. Dalam persidangan Nuremberg setelah Perang Dunia II banyak petinggi Nazi yang menjadi terdakwa menyatakan bahwa mereka tidak bersalah atas tindakan kejahatan seperti pembantaian kaum Yahudi di kamp konsentrasi atau pembunuhan tawanan perang – yang diperintahkan dan dilakukan - karena mereka semata-mata “mematuhi perintah”. Para terdakwa akhirnya dinyatakan bersalah secara hukum, tetapi apakah mereka masih bisa dikatakan tidak bersalah dari aspek etika militer? Bukankah mereka dan seluruh anggota *Wehrmacht* dituntut mengucapkan sumpah setia pada *Führer* dan karenanya secara moral harus patuh pada perintah sesuai dengan sumpahnya?

Konteks yang sama bisa dikatakan pada kejahatan yang dilakukan oleh Polisi Militer Amerika Serikat terhadap para tawanan di penjara Abu Ghraib di Irak tahun 2003. Ketiadaan perintah yang melarang terjadinya kekejaman saat itu tidak berarti bahwa anggota Tentara boleh melakukan hal semena-mena. Kasus terakhir yang memperlihatkan kepatuhan buta adalah kala kendaraan yang ditumpangi Kolonel TNI Priyanto menabrak sepasang kekasih di Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat akhir tahun 2021. Para saksi di tempat kejadian melihat mobil penabrak berhenti dan mengangkat korban ke dalam mobil dan mengira penabrak - sang kolonel dan dua anggota TNI lainnya berpangkat koprал - bahwa akan membawa korban ke rumah sakit. Ternyata atas perintah sang kolonel kedua korban justru dibuang ke aliran Sungai Sedayu, Banyumas, Jawa Tengah. Perilaku kolonel tersebut jelas salah, tetapi yang mengkhawatirkan adalah mengapa kedua koprал – Koprал Satu Ahmad Soleh dan Koprал Dua Andreas Dwi Atmoko - begitu saja mengikuti instruksi sang perwira, kemungkinan besar mereka sekedar “mematuhi perintah”. Dalam kenyataan, berapa banyak prajurit yang berani melanggar perintah (yang salah) apalagi jika telah bersumpah akan selalu menaati perintah dan bahkan tidak akan mempertanyakannya?

Ketiganya - Kolonel Priyanto dan kedua kopral - memang dinyatakan bersalah secara hukum pidana atas penculikan dan pembunuhan berencana. Sang kolonel memang bersalah, namun apakah Kopral Ahmad Saleh dan Andreas Dwi Atmoko juga bersalah karena menuruti perintah? Bukankah sebagai prajurit mereka telah bersumpah untuk “taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan?”

Di zaman modern ini, kemajuan teknologi telah membuat medan pertempuran tidak saja makin luas tetapi dilakukan dengan jumlah pasukan yang lebih kecil. Tugas tempur yang dulunya diisi oleh barisan prajurit berjumlah ribuan yang menyerang dengan pedang atau senapan kokang diganti oleh selusin prajurit komando khusus (bahkan lebih kecil) dengan senjata mutakhir. Bersama dengan mengecilnya jumlah pasukan di medan tempur, makin tinggi juga tanggung jawab yang diemban oleh prajurit berpangkat rendah; yang dulunya segala keputusan, perintah dan tanggung jawab diemban oleh perwira lapangan dan tinggi, kini keputusan yang berdampak luas harus diambil oleh perwira junior bahkan bintara atau tamtama. Hal yang tidak berubah adalah bahwa perintah dari petinggi militer biasanya jauh dari medan tempur yang sebenarnya. Tanpa berada di medan tempur yang sebenarnya petinggi militer belum tentu dapat mempertimbangkan keputusannya berdasarkan keadaan yang benar saat itu. Perintah yang diberikan bisa saja tidak sesuai dengan kondisi lapangan, atau bisa saja sesuai tetapi keadaan sudah berubah dan keputusan tersebut tidak lagi relevan dengan keadaan lapangan saat perintah diterima. Pengambilan keputusan yang penting – relevan dengan tujuan dan kondisi lapangan – yang harus secara cepat dilaksanakan harus mampu dilakukan oleh prajurit dengan pangkat rendah; masa sekarang ini disebut sebagai era *strategic corporal*.

Di satu sisi, pandangan deontologis etika militer dapat membuat pelaku tindakan kejahatan perang melepaskan diri dari tanggung jawab dengan alasan menaati perintah, di sisi lain pernyataan bahwa kepatuhan perintah adalah tindakan moral dan bersifat mutlak meniadakan ruang calon pelakunya untuk menolak jika diketahui bahwa perintah tersebut salah. Dalam konteks etika militer Goffi<sup>9</sup> menyebut bentuk kepatuhan buta – kepatuhan sekedar karena kepatuhan semata - sebagai “*low-cost deontology*” karena kepatuhan seperti ini melepaskan pelakunya dari tanggung jawab. Kant yang membedakan antara tindakan yang sejalan dengan kewajiban (*in conformity with duty*) dengan yang berdasarkan

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hal. 35.

kewajiban (*from duty*), maka prajurit yang melaksanakan perintah karena sekedar diharuskan oleh peraturan bukanlah tindakan moral.

Beberapa contoh di atas, serta beberapa contoh lain yang akan diulas pada Bab V memperlihatkan bahwa kepatuhan mutlak pada perintah atasan bukan saja menghalangi prajurit untuk berpikir – dan menggunakan akalnyanya sebagai makhluk berakal budi – tetapi juga dapat menghalangi tercapainya tujuan perang. Contoh yang nyata adalah saat pasukan Inggris di Pertempuran Somme 1916 secara mutlak menuruti perintah menyerang walau para komandan lapangannya tahu bahwa garis pertahanan Jerman tidak terpengaruh pemboman awal, kawat berduri yang menghalangi laju penyerangan masih utuh dan pasukan Jerman akan siap menghadapi serangan dengan senapan mesin sedangkan pasukan Inggris dengan beban bawaan berat akan melewati daerah terbuka tanpa perlindungan.

Kepatuhan mutlak dalam hal ini dapat berakibat fatal mengingat unsur penggunaan kekerasan, bahaya dan kematian dalam perang. Namun bagaimana seorang prajurit bisa melakukan tindakan yang benar – walaupun dengan cara melanggar perintah karena perintah tersebut adalah salah – jika satu-satunya bentuk tindakan moral adalah kepatuhan pada perintah. Namun bagaimana seandainya kepatuhan pada suatu perintah berakibat tidak tercapainya tujuan, sedangkan satu-satunya cara pencapaian tujuan justru dengan melanggar perintah tersebut? Bagaimana seorang prajurit dapat melakukan hal yang benar jika satu-satunya tindakan moral adalah kepatuhan pada perintah?

*Vom Krieg* atau *On War* karya Clausewitz sering dijadikan rujukan pembahasan mengenai perang, namun kebanyakan acuan tersebut digunakan dalam pembahasan mengenai strategi dan masih jarang terdapat tulisan yang merujuk pada pemikiran Clausewitz mengenai sisi kemanusiaan dan etika. Christopher Bassford, pakar Clausewitz dan penyunting *The Clausewitz Homepage*<sup>10</sup> menyebut bahwa peneliti Clausewitz dapat dikategorikan menjadi empat kelompok atau mazhab (*school*) yaitu:

- *Original intent school* yang sebagian besar adalah sejarawan yang meneliti pengaruh Clausewitz pada masanya antara Revolusi Prancis dan era Napoleonik;
- *Inspirationalist school* yang sebagian besar adalah peneliti politik atau pakar strategi bisnis yang mencari inspirasi strategi dari Clausewitz;

---

<sup>10</sup> <http://www.clausewitz.com/>

- *Receptionist school* yang terdiri dari sejarawan yang tertarik pada dampak pemikiran Clausewitz dan dampaknya pada perkembangan pemikiran sekarang; dan
- *Editorial school* yaitu mereka yang berusaha menafsirkan apa sebenarnya yang menjadi pemikiran Clausewitz dengan membaca naskah-naskah asli untuk memahami cara Clausewitz menyampaikan pendapatnya

Pada dasarnya kebanyakan peneliti dan penulis masuk menjadi satu atau bauran dari pandangan di atas.<sup>11</sup> Ada banyak penulis yang membahas Clausewitz dari aspek pemikirannya pada strategi dan politik seperti Hugh Smith, Michael Handel dan Andreas Herberg-Rothe; Azar Gat melihat Clausewitz sebagai bagian dari perkembangan strategi dari masa ke masa dalam *The History of Military Thought*<sup>12</sup>; Harry Summers menulis mengenai Perang Vietnam dalam struktur pemikiran Clausewitz dalam *On Strategy: The Vietnam War in Context*<sup>13</sup>; bahkan manual Korps Marinir Amerika Serikat *Warfighting*<sup>14</sup> banyak merujuk langsung pada *On War*. Perjukan pemikiran Clausewitz mengenai strategi sebagai inspirasi perkembangan strategi pemasaran dan bisnis dilakukan oleh Bassford sendiri saat terlibat bersama Tiha von Ghyczy dan Bolko von Oetinger dalam bukunya *Clausewitz on Strategy*<sup>15</sup> dan Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand dan Joseph Lampel dalam *Strategy Safari*<sup>16</sup> menyatakan dalam bisnis strategi yang diprakarsai Clausewitz masuk ke dalam mazhab *positioning school*. Clausewitz dalam konteks sejarah banyak dibahas Hew Strachan dan Donald Stoker sedangkan ulasan mengenai pemikiran teoritis dan penulisan Clausewitz dilakukan oleh Jon Sumida, Ramon Aron dan Youri Cormier.

Banyaknya tulisan di atas menunjukkan kecenderungan untuk merujuk tulisan Clausewitz semata-mata dari sisi pemikirannya mengenai strategi dan perang, hampir tidak ada yang merujuk pemikirannya pada aspek pelaku perang dan strategi itu sendiri yaitu manusia serta etika yang diemban. Begitu pun mengenai etika militer, kebanyakan pembahasan yang ada

---

<sup>11</sup> Brassford, Christopher (2007) Primary Policy and Trinity in Clausewitz's Thought dalam Strachan, H. & Herberg-Rothe, A. (Penyunt.). (2007). *Clausewitz in the Twenty-First Century*. Oxford: Oxford University Press.

<sup>12</sup> Gat, Azar. (2001) *A History of Military Thought*. Oxford: Oxford University Press

<sup>13</sup> Summers, Harry G. Jr (1982) *On Strategy: The Vietnam War in Context*. Pennsylvania: US Army War College.

<sup>14</sup> US Marine Corps (1994) *Warfighting*. New York: Currency Doubleday

<sup>15</sup> Bassford Christopher., Ghyczy, Tiha von, Oetinger, Bolko von (Penyunt.) (2001) *Clausewitz on Strategy*. New York: John Wiley & Sons.

<sup>16</sup> Mintzberg, H. Ahlstrand, B. Lampel, J. (1998) *Strategy Safari* NY: The Free Press.

melihatnya dari sudut pandang etika yang tinggi dan kaitannya dengan politik atau hukum perang atau pandangan terhadap paham *jus ad bellum* dan *jus in bello*. Tidak banyak yang mengupas etika militer yang menyangkut tingkat yang mendasar yaitu pada dasar panduan perilaku prajurit individu, apalagi dengan mengaitkannya dengan Clausewitz.

Clausewitz menyatakan bahwa perang adalah “sekedar perpanjangan kebijakan dengan cara lain.”<sup>17</sup> Itu berarti bahwa kegiatan perang (pernyataan perang, mobilisasi, pengerahan pasukan dan sebagainya) harus didasari dan sesuai dengan kebijakan negara. Pernyataan tersebut meletakkan angkatan bersenjata di bawah pemerintah dan tunduk padanya, maka segala perintah dan tindakan anggota angkatan bersenjata dari pangkat terendah secara bertahap juga harus tunduk pada pangkat di atasnya sampai pada pembuat kebijakan. Keutamaan angkatan bersenjata menurut Clausewitz bukan keberanian semata, walaupun keberanian adalah komponen yang sangat penting. Keberanian adalah bagian dari “sifat manusia yang dapat dikembangkan dalam diri prajurit dengan cara berbeda dari orang lain” dan karenanya seorang prajurit “harus dapat menahan diri dari hasrat kekerasan dengan tunduk pada panggilan yang lebih tinggi yaitu kepatuhan (*Gehorsam, obedience*), tata tertib (*Ordnung, order*), peraturan (*Regel, rule*) dan metode (*Methode, method*)<sup>18</sup>.”

Clausewitz menjelaskan prinsip, peraturan dan metode sebagai komponen untuk membuat doktrin karena seringnya muncul dalam tingkatan taktis,<sup>19</sup> namun penyebutan kepatuhan hanya muncul waktu Clausewitz menulis “pelanggaran terhadap semangat kepatuhan sepatutnya ditanggapi sebagai kejahatan yang berbahaya karena dalam perang tidak ada yang lebih penting dari kepatuhan.”<sup>20</sup> Namun ini terkesan bertentangan dengan pandangan Clausewitz mengenai jenius militer (*Der kriegerische Genius; military genius*) yang justru tidak boleh terkekang oleh peraturan.<sup>21</sup>

Kleemeier (2007)<sup>22</sup> menganggap Clausewitz tidak mengikutsertakan kepatuhan sebagai kekuatan moral karena tidak sesuai dengan pemikiran Clausewitz mengenai jenius. Kepatuhan semata tidak cocok bagi prajurit handal yang memiliki kemampuan *coup d'oeil*,

---

<sup>17</sup> Clausewitz, C. v. (1984). *On War* (Indexed ed.). (M. Howard, P. Paret, Penyunt., M. Howard, & P. Paret, Penerj.) Buku I/1.24.

<sup>18</sup> *Ibid.* III/5.

<sup>19</sup> *Ibid.* II/4.

<sup>20</sup> *Ibid.* II/6.

<sup>21</sup> *Ibid.* I/3 dan II/2.

<sup>22</sup> Kleemeier, U. (2007). *Moral Forces in War*. Dalam H. Strachen, & A. Herberg-Rothe (Penyunt.), *Clausewitz in the Twenty-First Century*. Oxford: Oxford University Press.

*courage d'esprit* serta kegagahberanian, dan walaupun ketidakpatuhan bisa berbahaya, akan lebih berbahaya lagi jika prajurit tidak dilatih untuk menggunakan pikirannya. Samuel (2014)<sup>23</sup> menjelaskan pendekatan rantai komando yang diprakarsai oleh Prussia yaitu *Auftragstaktik* yang diterjemahkan sebagai *mission command* yaitu sikap komandan yang memberikan kebebasan pelaksanaan perintahnya, komandan tidak akan campur tangan dengan keputusan bawahannya dan menganggap bahwa mereka tahu keadaan lapangan lebih dari komandannya dan akan menggunakan inisiatif. Maka kepatuhan semata pada perintah justru akan mengekang inisiatif. Para perwira staf di Prussia dilatih dan memiliki hak bahkan wajib untuk memberi masukan atau mempertanyakan keputusan komandannya.

Goffi (2016)<sup>24</sup> merujuk pada Kant yang membedakan antara tindakan yang sejalan dengan kewajiban (*in conformity with duty*) dengan yang berdasarkan kewajiban (*from duty*), maka prajurit yang melaksanakan perintah karena sekedar diharuskan oleh peraturan bukanlah tindakan moral. Tindakan melaksanakan perintah adalah tindakan moral hanya jika menurutnya adalah tindakan yang baik. Dari sudut pandang lain jika kepatuhan dikaitkan dengan keutamaan keberanian Aristoteles maka penolakan perintah (yang salah) adalah bentuk keberanian, begitu pula keberanian untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Goffi membandingkan kepatuhan dengan keberanian sebagai keutamaan, dan jika keberanian berada di antara sikap penakut dan sikap nekat, maka kepatuhan berada di antara sikap menurut sepenuhnya (kepatuhan pasif) dan pembangkangan, dan titik tengahnya adalah kepatuhan aktif.<sup>25</sup> Yang dimaksud kepatuhan aktif adalah adanya penekanan bahwa tindakan moral ada pada penggunaan akal serta tanggung jawab penerima perintah, maka titik tengah kepatuhan aktif seharusnya juga berarti pembangkangan aktif jika perintah yang diberikan tidak bermoral. Kesadaran ini dibutuhkan untuk melawan pandangan *low-cost deontology* yang melindungi penjahat perang dengan alasan “hanya menjalankan perintah.”

---

<sup>23</sup> Samuels, M. (2014). Friction, “Chaos and Order(s): Clausewitz, Boyd and Command Approaches.” *Journal of Military and Strategic Studies*, 15 (4).

<sup>24</sup> Goffi, E. R. (2014). “There is No Real Moral Obligation to Obey Orders: Escaping from 'Low Cost Deontology'”. dalam A. Ellner, P. Robinson, & D. Wetham (Penyunt.), *When Soldiers Say No*. New York: Ashgate Publishing. hal. 44-45.

<sup>25</sup> *Ibid.* hal. 46.

Ditinjau dari sisi sejarah, Gibbs (1975)<sup>26</sup>, Huntington (2000)<sup>27</sup> dan Gabriel (2007)<sup>28</sup> melihat bahwa etika militer terbentuk saat ketentaraan berubah dari konsep tentara bayaran (*mercenary*) yang matapencahariannya adalah berperang berubah menjadi tentara reguler (*regular army*) yang mengabdikan pada negara<sup>29</sup> dan bukan pada bangsawan yang membayarnya. Sebelum Abad XIX tidak ada negara yang memiliki korps perwira profesional, setelah Abad XX, hampir semua negara besar memilikinya.<sup>30</sup> Sebelum ada korps perwira profesional, yang menjadi perwira hanyalah para bangsawan dan pangkat didapat atas hasil jual beli<sup>31</sup> dan para tamtama dan bintara berasal dari lapisan rendah rakyat dan melihat keprajuritan sebagai mata pencaharian. Perwira sebelum Abad XIX melihat tamtama/bintara sebagai kelas yang jauh berbeda, dituntut kepatuhan buta karena memang dianggap tidak memiliki kemampuan untuk berpikir sendiri. Dengan adanya perkembangan pendidikan sekarang, dan Tentara di banyak negara demokrasi terdiri dari sukarelawan, maka masih perlukah kepatuhan buta diterapkan – baik bagi tamtama, bintara maupun perwira?

Dalam negara demokratis, masalah kepatuhan militer yang dasarnya adalah jika kepatuhan prajurit untuk dikirim berperang bertentangan dengan keyakinan pribadinya bahwa perang yang dinyatakan pemerintahnya adalah tidak sah. Prinsip perang yang sah jika berdasarkan asas *jus ad bellum* yang antara lain adalah memiliki alasan yang sah (mempertahankan diri karena diserbu, membantu negara lain yang tidak mampu membela diri, dan sebagainya), niat yang sah (misalnya membela diri) dan pernyataan perang dideklarasikan oleh pihak berwenang (misalnya pemerintah atau PBB).<sup>32</sup> Bermula dengan wajib militer di beberapa negara muncul gerakan *conscientious objector*, yaitu mereka yang menganggap adalah

---

<sup>26</sup> Gibbs, Norman H. (1975). "Clausewitz on the Moral Forces in War." *Naval War College Review*, Jan-Feb 1975 Vol. 27 No. 4: 15-22.

<sup>27</sup> Huntington, S.P. (2000). *The Soldier and the State*. Cambridge: Harvard University Press

<sup>28</sup> Gabriel, Richard A. (2007). *The Warrior's Way: A Treatise on Military Ethics*. Ontario: Canadian Defence Academy Press hal. 31-35.

<sup>29</sup> John Keegan (1994) menyebut enam jenis bentuk organisasi militer – *warrior, mercenary, slave, regular, conscript* dan *militia*. Yang terkait pada pemikiran Clausewitz hanya tiga terakhir.

<sup>30</sup> Gabriel (2000) hal. 19.

<sup>31</sup> Richard Holmes (2001) dalam *Red Coat: The British Soldier in the Age of Horse and Musket*. London: Harper Collins menjelaskan sistem membeli komisi ini masih tersisa dalam Bahasa Inggris *commissioned officer* yang selain berarti mendapat mandat dari pemerintah juga memiliki keterkaitan dengan proses jual-beli.

<sup>32</sup> Sejak Perang Dunia II Pemerintah Amerika Serikat belum pernah lagi mengeluarkan deklarasi perang, maka secara definisi Perang Vietnam dan Perang Teluk II bukan perang yang sah. Pengiriman pasukan ke Perang Teluk I (untuk membebaskan Kuwait dari pendudukan Iraq) adalah keputusan PBB, sama dengan Perang Korea dan perang melawan Serbia (oleh NATO).

haknya untuk tidak berperang karena alasan agama atau hati nurani. Jika perang yang dinyatakan pemerintahnya adalah sah, bisa saja *conscientious objector* tersebut jika terpanggil akan ditempatkan pada unit militer yang bersifat sipil atau tidak bersenjata (misalnya administrasi atau unit kesehatan). Masalah akan lebih sulit jika *conscientious objector* tersebut melihat perang yang akan ia hadapi tidak sah, sekali pun ia adalah sukarelawan.

Walzer (2006)<sup>33</sup> berpendapat bahwa prajurit hanya bisa mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai berdasarkan prinsip *jus in bello* yaitu tindakannya dalam perang dan tidak akan dipersalahkan atas keterlibatannya secara *jus ad bellum* karena itu adalah keputusan pemerintah dan hanya pemerintah yang bertanggung jawab. Namun bukankah keterlibatannya dalam perang mengandaikan ia setuju dengan keputusan pemerintahnya? Estlund (2007)<sup>34</sup> dan Montrose (2013)<sup>35</sup> menganggap bahwa jika seorang prajurit berperang dengan alasan yang tidak sah, maka seharusnya ia pun tidak mempunyai alasan untuk membela diri, artinya ia sama bersalahnya dengan pemerintahnya yang memulai perang yang tidak sah. Dampak demokrasi yang memberikan hak suara yang sama pada rakyatnya bertabrakan dengan sumpah kepatuhan pada pemerintah yang ia sendiri pilih.

## 1.2 Rumusan Masalah

Kepatuhan pada perintah adalah ciri dan tradisi dalam organisasi militer; kesannya deontologis dan karenanya tindakan moral adalah jika patuh pada perintah. Kepatuhan memang dibutuhkan dalam menjalankan tugas militer, apalagi ruang lingkup profesi militer adalah penggunaan kekerasan dan berbahaya. Namun jika kepatuhan pada perintah bersifat mutlak apakah bisa juga dikatakan sebagai tindakan moral? Kenyataannya banyak kejahatan dan kesalahan yang diperbuat dan pelakunya melepaskan diri dari tanggung jawab karena alasan “menuruti perintah.” Walau secara hukum pelaku kejahatan perang

---

<sup>33</sup> Walzer, M. (2006). *Just and Unjust Wars*. New York: Basic Books.

<sup>34</sup> Estlund, David (2007). “On Following Orders in an Unjust War”. *Journal of Political Philosophy* Vol 15 No.2, 2007: 213-234.

<sup>35</sup> Montrose, Jeff (2013). “Unjust War and a Soldier’s Moral Dilemma”. *Journal of Military Ethics* 12.4: 325-40.

dinyatakan bersalah, mereka masih bisa bersikukuh bahwa tindakannya benar karena mematuhi perintah pada dasarnya adalah tindakan moral dan mutlak.

Kepatuhan memang dibutuhkan dalam menjalankan tugas, namun kepatuhan mutlak atau kepatuhan pada perintah hanya karena kepatuhan semata – tanpa pemikiran atau pertimbangan – dapat mengakibatkan kerugian bagi usaha pencapaian tujuan perang. Contoh Pertempuran Somme 1916 menunjukkan bahwa banyak korban tewas sia-sia karena mengikuti perintah yang tidak sesuai dengan keadaan lapangan yang diperintahkan oleh para petinggi militer yang jauh dan tidak memahami kondisi medan tempur.

Jika suatu perintah salah maka seharusnya kepatuhan pada perintah tersebut juga merupakan tindakan yang salah, namun bagaimana seorang prajurit bisa menolak perintah jika telah bersumpah untuk tidak membantahnya? Apakah ada batas seberapa kepatuhan pada perintah bisa dikatakan tindakan moral, atau dengan kata lain apakah ada batasan yang menjadikan tindakan melanggar peraturan dapat dikatakan tindakan moral? Pembahasan ini tidak bisa dijelaskan dari aspek hukum semata, melainkan harus ditinjau dari etika militer itu sendiri.

Clausewitz menganggap keberanian tepatnya *Kühnheit/boldness* dan akal sebagai keutamaan Tentara dan kepatuhan sebagai komponen penunjangnya. Kepatuhan dianggap sebagai komponen penting dalam organisasi militer hingga Clausewitz bisa mengatakan bahwa kegagahberanian sampai menentang kepatuhan adalah berbahaya. Di sisi lain Clausewitz juga mengatakan bahwa strategi yang baik adalah untuk melanggar peraturan apabila hal itu dapat dipertanggungjawabkan secara moral.

Jika patuh pada perintah adalah tindakan moral berdasarkan etika profesi militer namun di sisi lain etika yang sama juga menuntut keberanian untuk melanggar peraturan, di manakah batas yang menyatakan bahwa menolak perintah bisa dibenarkan secara etika militer? Inilah masalah pokok yang ingin penulis tanggapi dalam disertasi ini.

### 1.3 Tesis

Batas moral kepatuhan militer dalam etika militer Clausewitz adalah kesesuaian antara alasan pengambilan tindakan dan pencapaian tujuan yang lebih tinggi yaitu tercapainya

tujuan perang – bukan sekedar pada tujuan perintah itu sendiri. Kepatuhan beserta tata tertib, peraturan dan metode adalah komponen pencapaian tujuan taktis; tujuan taktik adalah kemenangan di medan tempur dan strategi mengambil alih hasil taktis untuk dijadikan wahana pencapaian tujuan kebijakan<sup>36</sup>. Maka sikap terhadap perintah – terlepas patuh atau tidak – dinilai atas kegagahberanian pengambilan tindakan dengan pemahaman pada tujuan yang lebih tinggi.

Clausewitz mengatakan bahwa dalam perang “akan ada beberapa tindakan yang terbukti efektif maka akan dipakai terus menerus dan dengan pengalaman akan masuk menjadi teori”<sup>37</sup> namun “teori adalah untuk dipelajari, bukan dipakai sebagai doktrin”<sup>38</sup> dan seorang jenius melampaui peraturan karena baginya peraturan “tidak saja dibuat untuk orang bodoh melainkan peraturan itu sendiri adalah kebodohan.”<sup>39</sup>

Kita berada dalam era *strategic corporal* – era yang memungkinkan tindakan prajurit dengan berpangkat rendah berdampak pada kebijakan yang lebih tinggi<sup>40</sup>. Karenanya pemahaman kepatuhan tidak hanya terbatas pada pengambil keputusan atau perwira tinggi, namun mencakup Tentara secara keseluruhan hingga pangkat tamtama terendah. Ini membuktikan bahwa pandangan Clausewitz yang ditulis dua ratus tahun yang lalu masih relevan bagi etika militer masa kini.

#### **1.4 Relevansi dan Kebaruan**

Dengan pengetahuan bahwa sekarang ini tindakan prajurit berpangkat rendah dapat berdampak pada kebijakan yang lebih tinggi, etis tidaknya tindakan prajurit bisa dinilai terlepas dari doktrin kepatuhan semata. Pandangan ini akan memperkuat ketentaraan sebagai profesi dan bukan sekedar mata pencaharian serta prajurit sebagai manusia dan bukan automaton. Baik buruknya tindakan prajurit (terlepas mematuhi atau menolak perintah) bisa dinilai dari etika militer itu sendiri selain dari sisi hukum semata.

---

<sup>36</sup> *On War* II/1.

<sup>37</sup> *Ibid.* II/6.

<sup>38</sup> *Ibid.* II/2.

<sup>39</sup> *Ibid.* II/3, Clausewitz sendiri menggunakan istilah *idiot*.

<sup>40</sup> Chapa, J.O. (2018). “The Martial Virtues: A Role Morality for Soldiers?” *Social Theory and Practice* Vol. 44 No. 2: 179-198.

Karya Clausewitz yang hampir selalu dikaitkan dengan strategi seyogyanya juga mengulas sisi “halus”nya yaitu pemikirannya pada sisi kemanusiaan yang menjadi bagian besar dari tulisannya dalam *On War* namun jarang diangkat sebagai acuan. *Vom Krieg* ditulis sudah hampir dua abad yang lalu, namun jika tulisan ini dapat menjawab masalah di atas berarti bahwa pemikiran Clausewitz terkait etika militer dalam situasi perang amat mendasar, dan masih relevan dengan etika militer masa kini.

### 1.5 Metode Penelitian Disertasi

Metode penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini adalah kajian pustaka dengan pendekatan historis dan kritis. Penulis akan menganalisis buku karya Clausewitz *Vom Krieg* dalam bentuk terjemahan resminya berjudul *On War* yang dilakukan dan disunting oleh M. Howard dan P. Paret, dengan memberikan konteks sejarah pada pemikiran Clausewitz (Bab II dan IV karya tulis ini) dan memberikan tanggapan kritis terhadap pemikiran tersebut dalam konteks jaman sekarang (Bab VI karya tulis ini). Dalam menganalisis teks, penulis memusatkan perhatian pada pernyataan-pernyataan Clausewitz terkait tujuan perang dan kepatuhan pada perintah atasan dalam konteks peperangan. Seperti sudah penulis kemukakan di atas (di bawah 1.4 dan sebelumnya di bagian Latar Belakang Permasalahan) berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya atas buku *On War*, yang kebanyakan digunakan dalam pembahasan mengenai strategi, baik strategi dalam perang maupun dalam pemasaran, kajian ini terutama merujuk pada pemikiran Clausewitz mengenai sisi kemanusiaan dalam perang dan etika militer.

Rujukan utama yang penulis pakai dalam karya tulis ini adalah buku *On War*<sup>41</sup> terjemahan Howard dan Paret yang dianggap sebagai terjemahan resmi yang menjadi sumber kebanyakan tulisan mengenai Clausewitz. Untuk pembandingan penulis juga menggunakan terjemahan yang lebih awal dari J.J. Graham<sup>42</sup> yaitu yang merupakan cetak ulang dari terbitan pertamanya di tahun 1873, dan jika perlu rujukan pada bahasa asli jika terjemahan tidak memuaskan; dalam hal ini penulis akan merujuk pada edisi Wener-Halweg (1991)<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Clausewitz, C. v. (1984). *On War* (Indexed.) (Howard, M dan Paret, P.,Penyunt.) Princeton: Princeton University Press.

<sup>42</sup> Clausewitz, C. v. (2010). *On War* Volume 1 (Graham, J.J. Penerj.) Floating Press.

<sup>43</sup> Clausewitz, C. (1991). *Vom Kriege* (1853-7) (19th ed.). (W. Hahlweg, Penyunt.) Bonn: Dümmler.

yang dianggap sebagai rujukan resmi teks asli. Rujukan untuk edisi Howard Paret selanjutnya akan ditulis sebagai OW-HP dan edisi Wener Halweg sebagai VK-WH.

Penulis akan mengkaji pemikiran Clausewitz terkait batas kepatuhan juga dengan merujuk pada buku dan artikel jurnal yang berhubungan dengan etika dan sejarah militer (referensi ada pada Daftar Pustaka).

## 1.6 Tujuan

Tujuan penulis dalam meneliti dan menulis disertasi tentang “Batas Moral Kepatuhan Dalam Etika Militer Clausewitz.” Secara keilmuan dapat dirumuskan:

- Memperkenalkan pemikiran Clausewitz kepada publik di Indonesia, khususnya mereka yang berkecimpung dalam dunia militer; tulisan ini melihat pemikiran Clausewitz selain pada strategi, perang dan politik yang biasa diangkat jika membahas Clausewitz.
- Menunjukkan bahwa pemikiran Clausewitz terkait etika militer dalam perang, kendati ditulis sudah hampir dua abad yang lalu, amat mendasar dan ternyata masih relevan dengan etika militer masa kini;
- Menunjukkan bahwa kepatuhan buta pada perintah atasan atau *low-cost deontology* tidak sesuai dengan etika militer. Dalam situasi perang bisa dijadikan dalih melempar tanggung jawab militer dalam perang yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan.
- Memperlihatkan adanya alternatif lain selain dari aspek hukum dalam melakukan penilaian baik-buruknya tindakan dalam pelaksanaan tujuan militer, yaitu dari sudut pandang jiwa ksatria atau etika militer.

## 1.7 Sistematika Penulisan Disertasi

Pembagian tulisan ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tesis, kebaruan, metode penelitian, tujuan, susunan disertasi, dan biografi intelektual Clausewitz. Bab II akan memberikan latar belakang kepatuhan pada perintah, mengapa demikian pentingnya dalam

organisasi militer dan permasalahan yang timbul jika pada kepatuhan pada perintah dianggap merupakan hal yang mutlak.

Bab III Latar Belakang Pemikiran Clausewitz dan Etika Profesi Militer membahas latar belakang Clausewitz dan pandangannya terhadap supremasi pemerintah sipil atas angkatan bersenjata, moral dan keutamaan. Materi yang menyangkut hakekat perang dan strategi (yang justru paling banyak ditulis mengenai Clausewitz) akan disinggung jika relevan. Bab ini memberikan latar belakang pada pemikiran Clausewitz dan sejarah profesi militer yang menjadi dasar untuk pembahasan masalah kepatuhan.

Bab IV Kepatuhan dan Etika Militer Clausewitz memberikan konteks sejarah pada pemikiran Clausewitz. Pada masa kehidupan Clausewitz terjadi banyak sekali perkembangan, pandangan Clausewitz disebut sebagai hasil Abad Pencerahan yang memunculkan pemikiran ilmiah namun juga Romantisme yang mengedepankan emosi selain rasionalitas. Dari sudut sejarah perkembangan ketentaraan, Clausewitz melihat dampak tradisi korps perwira bangsawan yang menguasai organisasi militer sebagai “perwira amatir” kalah dengan Tentara berdasarkan semangat nasionalisme; Revolusi Prancis mendorong perombakan menjadikan korps perwira yang profesional. Tidak terlepas adalah perkembangan teknologi persenjataan yang memberdayakan adanya kepatuhan pada peraturan taktis. Bab ini menjelaskan apa yang menjadi tolok ukur suatu perintah yang sah serta permasalahan yang terjadi dalam kemelut pertempuran yang tidak pasti. Jawaban pada masalah tersebut dapat dilihat pada filsafat komando *Auftragstaktik*.

Bab V Batas Moral Kepatuhan membahas lebih dalam kaitan kepatuhan dengan keutamaan keberanian serta pemikiran rasional. Di sini akan dibahas apa yang dimaksud dengan perintah serta kepatuhannya. Perintah dalam hal ini adalah ungkapan atasan kepada bawahan berupa tindakan yang harus dilakukan (misalnya “maju jalan!”) maupun tujuan yang hendak dicapai (misalnya “kuasai bukit itu!”). Di sini pandangan Clausewitz mengenai sifat hirarkis subordinasi Tentara pada pembuat kebijakan (pemerintah sipil), taktis terhadap strategi, dan kepatuhan, tata tertib, peraturan dan metode terhadap taktik akan dihadapkan pada pandangannya pada jenius militer yang kreatif, berinisiatif dan justru melanggar peraturan.

Dari sini ditawarkan argumentasi yang memperlihatkan pandangan moral kepatuhan dan batasan saat ketidakpatuhan dapat dibenarkan secara keutamaan keberanian dan diulas

dengan beberapa contoh kasus. Argumen yang ditawarkan adalah kepatuhan buta pada perintah bukanlah tindakan moral, sebaliknya tindakan melanggar perintah dapat dikatakan sebagai tindakan moral jika didukung oleh situasi tertentu. Tindakan yang dianggap etis dalam pelanggaran perintah harus dibarengi dengan pemahaman akan tujuan yang lebih tinggi serta kemampuan untuk melanggar perintah tersebut.

Bab VI: Tanggapan Kritis berisi tanggapan terhadap tulisan dan perspektif etika militer dalam pemikiran Clausewitz serta tanggapan bahwa perang bukan saja kepanjangan dari politik, melainkan juga melibatkan perspektif etika deontologis dalam etika militer. Dari tanggapan kritis terlihat keterbatasan dalam tulisan ini yaitu cakupan pemikiran Clausewitz sebatas tentara reguler profesional, dan etika militer yang baik sukar diterapkan jika otoritas tertinggi dalam memberikan perintah – yaitu pemerintah – sudah salah misalnya penggunaan angkatan bersenjata sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dibanding untuk kebaikan masyarakat.

Tulisan diakhiri dengan Bab VII Penutup: Kesimpulan dan Saran Penelitian dan yang berisi kesimpulan yang memperlihatkan bahwa etika militer Clausewitz bersifat teleologis sebatas artian mengacu pada tujuan yang lebih tinggi dan lebih tepat dikatakan pragmatis karena tujuan akhir adalah pencapaian tujuan perang atau kebijakan negara. Pelaksana perintah bertanggung jawab kepada pemerintah yang mewakili kepentingan negara dan masyarakat. Tindakan melanggar perintah dapat dikatakan sebagai tindakan etis jika pelanggaran tersebut justru mendekatkan pada tujuan yang lebih tinggi dan didasari oleh pemahaman pada tujuan serta kemampuan untuk melakukan tindakan tersebut.,

## DAFTAR PUSTAKA

Rujukan utama

- Aron, Raymond (1986) *Clausewitz, Philosopher of War* (Christine Booker & Norman Stone, penerj.) New York: Simon & Schuster
- Bassford Christopher., Ghyczy, Tiha von, Oetinger, Bolko von (Penyunt.) (2001) *Clausewitz on Strategy*. New York: John Wiley & Sons
- Clausewitz, C. v. (1984). *On War* (Indexed ed.). (M. Howard, P. Paret, Penyunt & Penerj.) Princeton: Princeton University Press
- Clausewitz, C. v. (1991). *Vom Kriege* (1853-7) (19 ed.). (W. Hahlweg, Penyunt.) Bonn: Dümmler
- Clausewitz, C. v. (1992). *Historical and Political Writings* (P. Paret, D. Moran, Penerj. & Penyunt.). New Jersey: Princeton University Press
- Clausewitz, C. v. (2010). *On War* Volume 1 (Graham, J.J., Penerj.) Floating Press
- Cormier, Y. (2016). *War as Paradox – Clausewitz and Hegel on Fighting Doctrines and Ethics*. Quebec: McGill-Queen's University Press
- Gallie W. B. (2008). *Philosophers of Peace and War: Kant, Clausewitz, Marx, Engels and Tolstoy*. Cambridge: Cambridge University Press
- Handel, M. I. (Penyunt.). (2004). *Clausewitz and Modern Strategy*. Oxon: Frank Cas & Co. Ltd
- Heuser, Beatrice (2002). *Reading Clausewitz*. London: Random House
- Howard, M. (2002). *Clausewitz: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press
- Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, J. (1998). *Strategy Safari*. Hertfordshire: Prentice Hall
- Smith, H. (2004). *On Clausewitz - A Study of Military and Political Ideas*. New York: Palgrave Macmillan
- Stoker, D. (2014). *Clausewitz: His Life and Works*. New York: Oxford University Press.
- Strachan, H. (2007). *Clausewitz's On War: A Biography*. New York: Grove Press.

Strachan, H. & Herberg-Rothe, A. (Penyunt.). (2007). *Clausewitz in the Twenty-First Century*. Oxford: Oxford University Press.

#### Rujukan etika militer

Atkinson, Robert E. (2015). *The Limits of Military Officers' Duty to Obey Civilian Orders: A Neo-Classical Perspective*. Carlisle Barracks: US Army War College Press

Brough M.W., Lango, J.W., Linden, H.v.d. (Penyunt.) (2007). *Rethinking the Just War Tradition*. Albany: University of New York Press

Challans T. L. (2007). *Awakening Warrior – Revolution in the Ethics of Warfare*. Albany: University of New York Press

Ellner, P., Robinson, P., Wetham, D. (Penyunt.) (2014) *When Soldiers Say No*. New York: Ashgate Publishing

Gat, Azar. (2001) *A History of Military Thought*. Oxford: Oxford University Press

Gabriel, Richard A. (2007). *The Warrior's Way: A Treatise on Military Ethics*. Ontario: Canadian Defence Academy Press

Gunther, Michael J. (2012) *Auftragstaktik: The Basis for Modern Military Command*. Fort Leavenworth, Kansas: School of Advanced Military Studies, US Army Command and General Staff School.

Lucas, George (Penyunt.). (2015). *Routledge Handbook of Military Ethics*. New York: Routledge

Lucas, George (2016). *Military Ethics*. New York: Oxford University Press.

Lucas, George (2020). *Ethics and Military Strategy in the 21<sup>st</sup> Century*. New York: Routledge

Muth, Jörg (2011) *Command Culture*. TX: University of North Texas Press

Olsthoorn, Peter (2011). *Military Ethics and Virtues: An Interdisciplinary Approach for the 21<sup>st</sup> Century*. New York: Routledge

Robinson, P., Lee, N. d., & Carrick, D. (Penyunt.). (2008). *Ethics Education in the Military*. England: Ashgate Publishing Limited

Sorabji, R., & Rodin, D. (Penyunt.). (2006). *The Ethics of War*. England: Ashgate.

Supriyanto, Makmur (2016) *Teori Etika Perang Yang Sah*. Jakarta: MCI

Toiskallio, J. (Penyunt.) (2007). *Ethical Education in the Military*. Helsinki: Acie Publication

Walzer, Michael (2006). *Just and Unjust Wars*. New York: Basic Books

#### Rujukan pendukung

Aristotle (2004) *Nicomachean Ethics* (Roger Crisp Penyunt. Penerj.). Cambridge: Cambridge University Press

Bartholomees, J. Boone, Jr. (penyunt.)(2010) *Theory of War and Strategy* Vol. 1 4th Ed. Carlisle PA: US Army College Press

Cockburn, Andrew (2016) *Kill Chain*. London: Verso

Davies, Barry (2013). *Soldier of Fortune: Guide to How to Become a Mercenary*. New York: Skyhorse Publishing

Freedman, Lawrence. (2013). *Strategy: A History*. New York: Oxford University Press.

Gat, Azar. (2001). *A History of Military Thought*. Oxford: Oxford University Press

Gheyn, Jaocb de (1999) *The Exercise of Arms*. (Bas Kis, Penyunt.) New York: Dover Publications

Gladwell, Malcolm (2008) *Outliers – The Story of Success*. New York: Little, Brown and Company

Gray, Glenn J. (1998) *The Warriors – Reflections on Men in Battle*. Nebraska: University of Nebraska Press

Griffith, Paddy (1990) *Forward Into Battle*. CA: Presidio Press

Holmes, Richard. (2001). *Red Coat: The British Soldier in the Age of Horse and Musket*. London: Harper Collins

Huntington, S.P. (2000). *The Soldier and the State*. Cambridge: Harvard University Press

Ignatief, Michael (1998) *The Warrior's Honor: Ethnic War and the Modern Conscience*. London: Chatto & Windos

Keegan, John. (1978). *The Face of Battle*. New York: Penguin Books.

Keegan, John. (1994). *A History of Warfare*. New York: Alfred A. Knoff.

Luttrell, Marcus. & Robinson, Patrick (2007) *Lone Survivor*. New York: Little, Brown and Company

Machiavelli, Niccolò (2005) *The Prince* (Peter Bondanella, Penerj. & Peny.). New York: Oxford University Press

Mintzberg, H. Ahlstand, B. Lampel, J. (1998) *Strategy Safari* NY: The Free Press

Nasution, A.H. (1966) *Pokok-Pokok Gerilya*. Jakarta: Pembimbing Masa

Stockdale, James B. (1984). *A Vietnam Experience*. Stanford: Hoover Institution Press

Stoneberger, Brett A. (2005) *Combat Leader's Field Guide* 13th Ed. Mechanicsburg: Stackpole Books

Sudarminta J. (2013) *Etika Umum*. Yogyakarta: Kanisius

Summers, Harry G. Jr (1982) *On Strategy: The Vietnam War in Context* Pennsylvania: US Army War College

US Marine Corps (1994) *Warfighting*. New York: Currency Doubleday

US Marine Corps (1994) *Strategy*. Washington DC: Headquarters US Marine Corps

US Marine Corps (1997) *Campaigning*. Washington DC: Headquarters US Marine Corps

Jurnal:

Alterman, Eric (1987). "The Uses and Abuses of Clausewitz". *US Army War Collage Quarterly* Vol. 17 No. 1

Aronovitch, H. (2001). "Good Soldiers, A Traditional Approach". *Journal of Applied Philosophy* Vol. 18 No.1

Betts, Richard K. (2000). "Is Strategy an Illusion?" *International Security* Vol 25 No.2: 5-50

Beyerchen, Alan (1993). "Clausewitz, Nonlinearity, and the Unpredictability of War". *Intrnational Security* Vol. 17 No.3: 59-90

Chapa, J.O. (2018). "The Martial Virtues: A Role Morality for Soldiers?" *Social Theory and Practice* Vol. 44 No..2: 179-198

Cornish, Paul (2003). "Clausewitz and the Ethics of Armed Force: Five Propositions". *Journal of Military Ethics* (2003)(2(3)):213-226

- Estlund, David (2007). "On Following Orders in an Unjust War". *Journal of Political Philosophy* Vol 15 No.2, 2007: 213-234
- Fichte, Johann Gottlieb (2016) (Ian Alexander Moore & Christopher Turner, Penerj.) "On Machiavelli, as an Author, and Passages from His Writings". *Philosophy Today* 60(3) (Summer 2016): 761-88
- Gibbs, Norman H. (1975). "Clausewitz on the Moral Forces in War". *Naval War College Review*, Jan-Feb 1975 Vol. 27 No. 4: 15-22
- Herberg-Rothe, Andreas (2015). "Theory and Practice: the Inevitable Dialectics – Thinking with and beyond Clausewitz's Concept of Theory". *Militaire Spectator*.184 No.4
- Herberg-Rothe, Andreas (2022). "Philosophy and Methodology in Clausewitz's Work". *The Philosophical Journal of Conflict and Violence*. Vol.VI Issue I/2022
- Hickman, John (2009). "Explaining the Interbellum Rupture in Japanese Treatment of Prisoners of War". *Journal of Military and Strategic Studies Volume* 12, Issue 1, Fall 2009
- Labuschagne, P. (2019). "Small Wars and People's War: A Clausewitzian Perspective on the South African War, 1899-1902". *South African Journal of Military Studies* Vol. 1 No.1
- Manzin, Maurizio (2005) "Obbedienza e diritti umani: contributo allo studio dell'obbedienza militare nelle missioni internazionali di pace". dalam Armellini, Serenella & Teresa (penyunt.) *Domenico Farias (1927-2002). Omaggio alla memoria*. Giuffrè: Milano.
- Montrose, Jeff (2013). "Unjust War and a Soldier's Moral Dilemma". *Journal of Military Ethics* 12.4: 325-40
- Paret Peter (2015) "Machiavelli, Fichte, and Clausewitz in the Labyrinth of German Idealism" *Etica & Politica / Ethics & Politics*, XVII, 2015, 3, pp. 78-95
- Samuels, Martin (2014). "Friction, Chaos and Order(s): Clausewitz, Boyd and Command Approaches". *Journal of Military and Strategic Studies* Vol 15 Issue 4 2014
- Scheipers, Sybille. (2021). "Do Not Despair at Your Fate: Carl von Clausewitz in French Captivity, 1806-1807", *War In History* 2021 Vol 28(1) 5-28
- Schulzke, Martin (2013). "Ethically Insoluble Dilemmas in War". *Journal of Military Ethics* 12:2, 95-110
- Sumida, Jon (2014). "A Concordance of Selected Subjects in Carl von Clausewitz's On War". *Journal of Military History*, 78 (Jan 2014): 271-331
- Vandergriff, Donald E. (2018) "How the Germans Defined Auftragstaktik: What Mission Command is and is Not." *Small Wars Journal*  
<https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/how-germans-defined-auftragstaktik-what-mission-command-and-not> diakses 06/21/2021

Waldman, Thomas (2012). "Clausewitz and the Study of War". *Defence Studies*, 12:3, 345-37

Widder, Werner (2002) "Auftragstaktik and Innere Führung: Trademarks of German Leadership". *Military Review* September-October 2002

